

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BAHAN BAKAR  
PREMIUM CAMPURAN  
(Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan,  
Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) Dalam Program Studi Muamalah**

**Oleh :**

**M Abduh Assumandy  
1421030116  
Jurusan: Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BAHAN BAKAR  
PREMIUM CAMPURAN**

**(Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan,  
Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) Dalam Program Studi Muamalah**

**Oleh :**

**M Abduh Assumandy  
1421030116**

**Jurusan: Muamalah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/2018 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan tukar menukar dengan harta. Jual beli ialah caranya bagi manusia berinteraksi satu dengan yang lain, karna bagi makhluk sosial membutuhkan yang namanya benda atau harta yang dimana untuk melangsungkan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jual beli juga diperbolehkan dalam Islam, tapi permasalahan yang ada dimasyarakat Kelurahan Kuripan melakukan praktek jual beli yang merugikan bagi orang banyak. Yang disebut merugikan ialah menjual premium bukan yang sama di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), dengan mencampur premium murni dengan oli bekas yang sudah di olah sebelum tercampur dengan premium murni.

Masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana praktik jual beli bahan bakar premium campuran pada pedagang eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi. Kedua Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bahan bakar premium dan di jual kembali dengan mencampur bahan bakar premium pada pedagang eceran Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli bahan bakar premium campuran yang ada dimasyarakat kelurahan kuripan serta untuk mengetahui bagaimana Islam memandang jual beli bahan bakar premium campuran pada pedagang eceran.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak pembeli premium dan penjual dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dapat melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat di perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertama praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang eceran di Kelurahan Kuripan yang melakukan mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas tidak dibenarkan dalam Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 dengan ancaman sanksi pidana kurungan enam tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,-. Kedua jual beli yang dilakukan pedagang eceran di Kelurahan Kuripan termasuk dalam jual beli yang dilarang menurut Hukum Islam yakni jual beli *gharar* mengandung kesamaran yang dapat merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan dengan mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muhammad Abduh Assumandy  
Npm : 1421030116  
Program Studi : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Erina Pane S.H., M.Hum.**  
NIP.197005022000032001

  
**Eka Hidayat S.Sos., M.H.**  
NIP.197509302003121002

Ketua Jurusan Prodi Muamalah

  
**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
NIP.197208262003121002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BAHAN BAKAR PREMIUM CAMPURAN (STUDI KASUS PADA PEDAGANG ECERAN KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS)**, disusun oleh **Muhammad Abduh Assumandy**, Npm : **1421030116**, Jurusan : **Muamalah**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari tanggal :

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Penguji : **Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.**

Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I.**

Penguji I : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Penguji II : **Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. Alim Syah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002



## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ  
بَيْعِ الْغَرَرِ

*"Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar.<sup>1</sup>*

**Hadis riwayat Abu Hurairah ra**



---

<sup>1</sup> A.Hassan, Bulughul-Maram, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2006), H.348

## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Abduh Assumandy, dilahirkan di Pangkal Pinang, pada tanggal 20 Mei 1996, anak dari pasangan Bapak Maulinuddin dan Ibu Sumyati.

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kota Agung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah (SMPM) Kota Agung pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Agung pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.
4. Institut Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018.



## DAFTAR ISI

Cover Luar .....	I
Cover Dalam .....	Ii
Halaman Judul .....	Iii
Abstrak.....	Iv
Persetujuan Pembimbing .....	V
Pengesahan .....	Vi
Motto .....	Vii
Persembahan .....	Viii
Riwayat Hidup .....	Ix
Kata Pengantar .....	X
Daftar Isi .....	Xi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam dan Fiqh Muamalah	
1. Pengertian Hukum Islam dan Fiqh Muamalah .....	17
2. Pembagian Fiqh Muamalah .....	22
3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah .....	23
B. Akad	
1. Pengertian akad. ....	24



2. Dasar hukum akad.....	25
3. Rukun dan syarat-syarat.....	25
C. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli .....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	35
4. Macam-Macam Jual Beli.....	40
5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam .....	44
D. Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .....	49
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian	
1. Profil Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.....	55
2. Kedadaan Geografis Kelurahan Kuripan.....	58
3. Kondisi Demografis Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.....	58
B. Praktik Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus	
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Praktik Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran pada Pedagang Eceran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.....	72

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “ **Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bahan Bakar Campuran** (Studi Kasus pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (menengok, memeriksa, mengamati, dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam ialah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h.1470

hukum Islam. Secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebuah *syari'ah* atau *syar'a*.<sup>3</sup>

3. Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu "*al-bai*" bentuk *mufrad* dari kata "*al-buyuu*" yang berarti tukar menukar sesuatu barang.<sup>4</sup>
4. Bahan bakar adalah barang yang akan dibuat menjadi suatu kebutuhan kendaraan guna menjalankan transportasi.<sup>5</sup>
5. Premium adalah bahan bakar minyak jenis *distilat* berwarna kekuningan yang jernih. Premium merupakan oktannya tidak tinggi, juga BBM untuk kendaraan bermotor yang paling populer di Indonesia.<sup>6</sup>
6. Campuran sesuatu yang dicampurkan atau untuk mencampurkan gabungan dan kombinasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat yang disimpulkan bahwa yang dimaksud skripsi ini adalah "**Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bahan Bakar Campuran** (Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus). ialah dalam jual beli yang bahan bakar premium bercampur dengan bahan yang lain, itu tidak diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>3</sup>Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta, Total Media, 2016), H.9

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997), H.56.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta Balai Pustaka, 2002), H.75

<sup>6</sup>Ibid, H.787

<sup>7</sup>Ibid, H.168



## B. Alasan memilih judul

Adapun alasan memilih judul dan menentukan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bahan Bakar Premium Campuran.” adalah

### 1. Alasan objektif

Karena adanya praktik jual beli bahan bakar premium campuran pada masyarakat di desa kuripan sehingga penelitian ini di anggap perlu guna menganalisis dari sudut pandang hukum Islam

### 2. Alasan subjektif

Penelitian ini didukung dengan *literature* yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Selain itu yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.

## C. Latar belakang masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak biasa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup didunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhan guna melengkapi panggilan hidupnya, untuk mereka melakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan becocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan usaha tersebut diantaranya meliputi jual beli.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), H.25

Suatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.<sup>9</sup> Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan secara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha allah swt di dunia dan di akhirat.

Allah SWT telah menghalalkan jual beli, dan dalam jual beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' (4) ayat (29), sebagai berikut :



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' [4] : 29 )*<sup>10</sup>

Jual beli menurut bahasa (*etimologi*), jual beli berarti “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Menurut istilah (*terminology*), menurut ulama

<sup>9</sup>Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: BPPE, 2003, H.3

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2000), H



Hanafiah, jual beli adalah “pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).<sup>11</sup>

Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak pada zaman Rasulullah Saw bahkan sampai sekarang meskipun bentuknya berbeda jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara operasional nya seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Dalam *Fiqih Sunnah*, jual beli sendiri adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan mau sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut *fiqh sunnah*, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariat. Di dalam Al-Quran surat Al Baqarah 275, dijelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya Jual beli. Yang diharamkan oleh Allah adalah *riba*, untuk itu, proses jual beli adalah suatu yang halal dan tidak dilarang. Dalilnya sebagaimana ayat berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

---

<sup>11</sup>A.khumadi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (IAIN Raden Lampung, 2015)  
h.187

الرَّبِیُّوْا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (*dari* mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah [01] : 275)<sup>12</sup>

Syariat Islam tidak melarang jual beli karena ada manfaat dan tujuan sosial yang ingin diraih. Manusia membutuhkan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal ini dilarang tentu saja manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah.

Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Premium merupakan oktannya tidak tinggi, dan juga bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor yang paling populer di Indonesia.<sup>13</sup> Pada umumnya Premium digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermesin bensin, seperti: mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol. Timbangan, takaran dan tipuan adalah jenis pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan

<sup>12</sup>Agama RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2000), H

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta Balai Pustaka, 2002), H.787

jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, contohnya jual beli bahan bakar premium campuran yang dilakukan pedagang eceran dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam memperjualbelikan atau menakar atau ukuran yang lainnya. Mereka merasa telah mendapat keuntungan dengan mengurangi timbangan takaran atau bilangan dan yang lainnya.

Umumnya masyarakat ataupun biasa menyebut perdagangan sebagai jual beli yang selama ini kita tidak akan lepas dari kegiatan tersebut, karena dengan adanya jual beli kita dapat memenuhi kebutuhan. Salah satu pemenuhan yang dapat dilalui dari jual beli yaitu jual beli bensin atau (bahan bakar minyak) BBM eceran yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian. Mekanisme ini mungkin sudah terjadi pada tahun sebelumnya, namun kenaikan harga bensin saat ini sangat dirasakan “sering” pada masa pemerintahan Jokowi-Jk. Bermula pada tahun 2015 lalu harga bensin Nasional untuk satu liter nya Rp. 7.600/ltr untuk harga eceran pedagang mematok untung sebesar Rp. 900 menjadi Rp. 8.500 dengan alasan dibulatkan untuk botol bensin yang belum tentu pastakoran 1 liter. hal tersebut terjadi pro dan kontra yang menyebabkan bensin terasa sangatlah mahal untuk masyarakat pedesaan yang jauh dari SPBU. Kemudian pada data tahun 2018, harga BBM nasional kembali turun, Rp.6.550/ltr, terjadi penurunan harga bensin menjadi Rp. 6.450/ltr ini untuk kalangan yang ada di



wilayah luar pulau Jawa, Madura, Bali (Jamali). Hal ini tentu disambut antusias oleh masyarakat.

Jadi dalam praktik yang ada dilapangan di Kelurahan Kuripan yang terjadi adanya kecurangan yang lakukan oleh pedagang dengan menjual bahan bakar bensin tidak sesuai dengan dari (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) SPBU yang mereka ambil. Adapun mereka banyak melakukan praktik nya tanpa ada seizin dari pihak SPBU karna dalam sesuai Undang Uundang No. 22 Tentang Minyak dan Gas bumi Tahun 2001) dalam Pasal 57:

1. tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 adalah pelanggaran.
2. tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, adalah kejahatan,<sup>14</sup> tidak boleh menjual tanpa adanya izin dari pemerintahan.

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli, maka harga yang adil akan mendorong para perilaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil, maka perilaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau tetap bertransaksi dengan menderita suatu kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 74 yang berbunyi :

---

<sup>14</sup> No Name, *Himpunan Peraturan Tentang Minyak, Gas Bumi, Pertambangan Batubara Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta, 2013)

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ  
 مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا  
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS. Al-A'raf [7] : 74)<sup>15</sup>

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan di zaman Rasulullah Saw. Beliau menjaga semua bentuk perdagangan yang dieratkan dengan prinsip keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun yang mendorong kepada pertenggaran dan keributan yang akan terjadi pada perdagangan, mengandung unsur riba atau muslihat. Walaupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tapi merugikan orang lain.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya jangka panjang. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka

<sup>15</sup> Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2000), H.127

penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis/kekerasan yang melanggar norma hukum.

Selain itu banyaknya warga yang melakukan kecurangan yang dilakukan ialah mencampur bahan bakar premium dengan zat yang berakibatkan kendaraan yang mengalami mogok serta kurang bagus untuk mesin motor. Zat yang digunakan oleh pedagang yaitu bahan kimia dan alami dan efek dari pencampurannya bahan bakar kendaraan pada premium tersebut. Namun dalam praktek tentang jual beli bahan bakar bensin campuran di lapangan tidak sesuai dengan *syar'a* atau ketentuan hukum Islam.

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini apabila penetapan harga masih tetap dilakukan tanpa kerelaan para pedagang maupun pembeli, maka hal itu tidak hanya mengacaukan harga dipasaran, tetapi juga menghilangkan barang-barang dipasaran. Dalam hal ini konsep penetapan harga yang tidak adil dirasakan juga oleh Ibnu Taimiyah, bahwa penetapan harga yang sewenang-wenang akan membawa dampak buruk bagi perekonomian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kiranya peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus pada



Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus).”

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan praktik jual beli bahan bakar premium campuran yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan oleh pedagang eceran yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bahan bakar premium campuran pada pedagang eceran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran Pada Pedagang Eceran Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus?

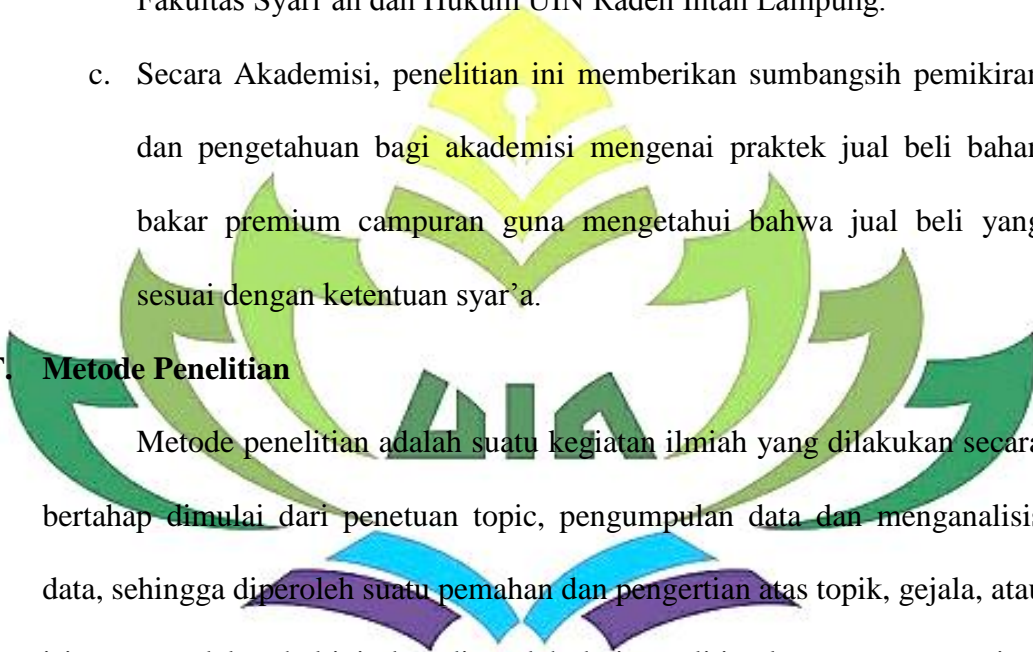
#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dalam praktik jual beli bahan bakar premium yang dilakukan oleh pedagang eceran
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli bahan bakar premium campuran.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- 
- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktek jual beli bahan bakar premium campuran yang dilakukan oleh pedagang eceran yang diberikan menurut tinjauan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- c. Secara Akademisi, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai praktek jual beli bahan bakar premium campuran guna mengetahui bahwa jual beli yang sesuai dengan ketentuan syar'a.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topic, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isi tertentu, dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan tentang jual beli bahan bakar premium pada pedagang eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi

atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang di jadikan objek penelitian.<sup>16</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli bahan bakar premium campuran ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu penjual dan pembeli. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yang berada di Kelurahan Kuripan yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara penjual dan pembeli.<sup>18</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat

---

<sup>16</sup>Sudarwan Danim , *Menjadi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung C.V. Pustaka Setia, 2002), H.54-55

<sup>17</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), H.19.

<sup>18</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.30



dokumen.<sup>19</sup> yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.<sup>20</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang melakukan praktek jual beli bahan bakar premium campuran berjumlah 50 orang penjual dan 50 orang pembeli.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti. Jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>21</sup> Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *proposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil dari beberapa orang yang mengetahui secara pasti. Jadi sampel yang diteliti adalah 10 orang masyarakat kelurahan Kuripan.

---

<sup>19</sup>Sugiyono , *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), H.137

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. *Interview*

*Interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat-alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Yaitu dengan melakukan wawancara kepada 50 penjual dan 50 pembeli.

##### b. *Dokumentasi*

*Dokumentasi* yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

#### 5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.
- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup> Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik jual beli bahan bakar premium campuran menurut fiqh muamalah yang akan dikaji menggunakan metode *deskriptif kualitatif* berdasarkan teori jual beli . Dimana melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.

---

<sup>22</sup>Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

<sup>23</sup>Ibid., h. 335



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam dan Fiqh Muamalah

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada Wahyu Ilahi. Oleh karena itu, disebut Syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktifitas *intelektual* manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan Wahyu Ilahi.

Fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum *syar'i* atau hukum *syarak*. Sebagai dari kumpulan hukum syarak yang diambil alih oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundangan yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan

demikian disebut kanun (*Al-Qanun*) yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata hukum Islam.<sup>24</sup>

Istilah-istilah dimaksud adalah syariah, *fikih*, hukum *syar'i*, kanun dan terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.

a. Syariah

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dan lebih khususnya lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang yang digariskan tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepat nya jalan menuju tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw disebut syariah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi.

Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan (*akidah*) dan ajaran tentang tingkah laku (*amaliah*). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas indentik dengan syarak (*Asy-syar'*) dan *ad-din* (agama Islam).

---

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.4.

Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek-aspek praktis (*amaliah*) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya indentik dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekadar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma-norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesulitan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan Islam.

b. Fikih

Kata “fikih” berasal dari kata arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fikih dipakai dalam dua arti: dalam arti hukum (*Jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*Law*).

Dalam arti pertama, fikih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dalam pengertian kedua, fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma hukum atau hukum-hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Maupun yang merupakan hasil *ijtihad*, yaitu *interpretasi* dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fukaha*) terhadap kedua sumber tadi, contoh hukum yang ditetapkan langsung

dalam Al-Quran atau hadis hukum haramnya transaksi riba (QS.2: 275), kewajiban memenuhi perjanjian (QS.5: 1). Contoh hukum yang tidak terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tetapi merupakan hasil *ijtihad* para ahli hukum Islam dengan mempertimbangkan kedua sumber tadi adalah kewajiban mencatatkan nikah, ketentuan penjatuhan talak di muka sidang pengadilan. Jadi, bila ada arti kedua, fikih adalah arti himpunan norma-norma yang menjadi objek kajian fikih dalam arti pertama.<sup>25</sup>

c. Hukum Syar'i

Hukum *syar'i* (hukum syarak, hukum syariah) secara *harfiah* berarti ketentan, norma atau peraturan hukum Islam, dan merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini untuk membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih (dalam arti hukum Islam) seperti dijelaskan di atas. Oleh karena itu, istilah ini sering di pakai dalam bentuk jamak "hukum-hukum syarak."

Secara teknis, dalam hukum Islam, hukum syarak didefinisikan sebagai "sapaan mana berisi tuntutan, perzinaan, atau penetapan." Definisi ini mengandung dua hal: 1. Bahwa hukum itu adalah sapaan ilahi yang tertunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum menyangkut tingkah lakunya, dan 2. Bahwa hukum merupakan sapaan ilahi itu berisi tuntutan, perzinaan (pembolehan) atau penetapan.<sup>26</sup> Secara keseluruhan, hukum adalah kewajiban (*al-ijab*), pengharaman (*at-*

---

<sup>25</sup>*Ibid.*,h.5.

<sup>26</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),h.6



sanksi memaksa yang ditentukan oleh kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang memerintahkan apa yang boleh dan terlarang untuk dilakukan.<sup>28</sup>

**2. Pengertian Fiqh Muamalah**

kata fiqh secara *etimologis*, berakar pada kata kerja yaitu: — **فَقَّهَ** — kata fiqh secara *etimologis*, berakar pada kata kerja yaitu: — **فَقَّهَ** yang artinya paham, pintar, dan kepintaran.<sup>29</sup> Menunjukkan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Sedangkan secara

kata fiqh secara *etimologis*, berakar pada kata kerja yaitu: — فَقَّهَ — فَقَّهَةً yang artinya paham, pintar, dan kepintaran.<sup>29</sup> Menujukan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Sedangkan secara *terminologis* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dalil yang terperinci. Selain itu muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: “*aamala-yuaamilu-mu'amalatan* sama dengan *wazan*” *faa'la-yufa'ilu- mua'falatan*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah *syara*, muamalah ialah

<sup>29</sup> Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fillughat*, (Beirut: Darul Masyrik, 1973), H. 591

kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>30</sup>

### 3. Pembagian Muamalah

Ibnu Abidin mengemukakan, bahwa fikih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. *Mu'awadlah maliyah* (hukum kebendaan)
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan)
- c. *Muhasanat* (hukum acara)
- d. *Amanat dan arayah* (pinjaman)
- e. *Tirah* (harta peninggalan).<sup>31</sup>

Ibn 'Abidin adalah salah satu seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas, sehingga munakahat termasuk salah satu fiqh muamalah, padahal munakahat sudah diatur dalam disiplin ilmu sendiri, dan tirah pun sudah dijelaskan dalam disiplin tersendiri, yaitu fiqh mawaris.

Al-Fikri dalam kitabnya menyatakan, bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1). *Al-muamalah al-madiyah*: yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fiqh muamalah meliputi benda yang halal, haram, dan syubhat untuk

---

<sup>30</sup> Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. dan Dra. Hj.Ru'fah Abdullah, M.M., *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 4

<sup>31</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.18

diperjualbelikan. Benda-benda yang membahayakan dan benda yang mendatangkan kemashlahatan bagi manusia.

2). *Al-mu'amalah al-adabiyah*: yaitu muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia Unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.<sup>32</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Berdasarkan pembagian fiqh muamalah tersebut diatas, maka ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Ruang lingkup muamalah abadiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, hak kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan indra manusia yang ada berkaitan dengan peredaran harta dalam masyarakat.
2. Ruang lingkup muamalah madiyah ialah jual beli, (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan dan dlanan*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta guna pakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*al-ujrah al-amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan

---

<sup>32</sup> Ibid., h.5

(*al-ibra*), damai (*al-shulshu*), dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah mahadisah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.<sup>33</sup>

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Akad berasal dari bahasa Arab yakni *Al-'aqd*, bentuk masdarnya adalah *'aqada* dan jamaknya adalah *Al-Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.<sup>34</sup>

Istilah “perjanjian” disebut dalam hukum di Indonesia sedangkan dalam hukum Islam disebut “akad”. Kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad (perjanjian).

*Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Khoiruddin, *Jual Beli Bermark-Up dan Pinjaman Bunga Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Adalah vol.9, Desember 2010, h.318.

<sup>34</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “*Akad Jual Beli dalam perspektif fiqh dan praktiknya di Pasar Modal Indonesia*”, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Vol.XII, No. 04, 4 Desember, 2015.

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.69.



## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al- Qur'an

#### 1) Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*<sup>36</sup>

Pada ayat diatas di jelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad tidak terpenuhi maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi para pihak yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah.

## 3. Rukun dan Syarat Akad

### 1. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.

---

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit.* h106.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

a. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*),

*Al- 'aqidan* adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut juga dengan istilah subjek hukum. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering kali disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai subjek perikatan (*'aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang telah mampu bertindak secara hukum.<sup>37</sup>

b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqad*)

*Shigatul- 'aqad* adalah pernyataan kehendak dari para pihak, *Shigatul- 'aqad* terdiri atas ijab dan qobul. Ijab dan qobul ini mempresentasikan perizinan (ridha, perizinan).

c. Objek akad (*mahallul- 'aqad*), dan

*Mahallul- 'aqad* adalah suatu yang dijadikan objek akad yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda yang berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.<sup>38</sup>

d. Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*)

---

<sup>37</sup> Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah" ,Al-Iqtishad, Vol. IV, No.1, 1 Januari 2012, h.23.

<sup>38</sup> *Ibid*, h.24.

*Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan suatu akad yang dilakukan, dalam Islam tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah. Ini berarti, apabila suatu akad dilaksanakan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.<sup>39</sup>

## 2. Syarat Terbentuknya Akad

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*).

*Rukun pertama*, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu

- a. *Tamyiz*, adalah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- b. Berbilang pihak (*at-ta'addud*).

*Rukun Kedua*, pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat, yaitu

1. Adanya persesuaian dengan ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat dari para pihak.
2. Kesatuan majelis akad.

*Rukun ketiga*, yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu

1. Objek itu dapat diserahkan, jadi objek yang di perjualbelikan dapat diserahkan
2. Tertentu atau dapat ditentukan.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h.25.

3. Objek dapat ditransaksikan.

*Rukun keempat* memerlukan satu syarat tidak bertentangan dengan syara.<sup>40</sup>

Jadi segala transaksi dalam muamalah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

### C. Jual Beli Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT.<sup>41</sup> Berfirman:

إِنَّا لِلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Quran) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. (QS.Fathir: 29).<sup>42</sup>

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan yang melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Op Cit*, h.98.

<sup>41</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h.39.

<sup>42</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahan*, (bandung: diponegoro, 2000), h.346.



تَمْلِكُ عَيْنِ مَا لَيْتَ بِمَعَا وَضَةٍ بِأَذِنِ شَرْعِي

Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.

مُقَا بِالْأَمَالِ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

مُقَا بِالْأَمَالِ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Tukar-menukar dengan benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضَاؤِ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara yang dibolehkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keetuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.<sup>43</sup>

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara.' Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.' Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar yang bukan kemafaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h.69.

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi buakan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>44</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, (w.790 h), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.<sup>46</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Dan Ijma.

### a. Al-Quran

Al-quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnnya secara metawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam Mushaf, dimulai dari Surah Al-Fatihah dan di

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h.69.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h.70.

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.114.

tutup dengan surah An-Naas.<sup>47</sup> Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.<sup>48</sup> Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi:<sup>49</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karna gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghunineraka, mereka kekal didalamnya.(QS.Surah Al-baqarah: 275)<sup>50</sup>

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt. Tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi,

<sup>47</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), H.50.

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Nasrun Haroen , Op. Cit, h.113

<sup>50</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahan*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.36



namun terdapat perbedaan yang mendasar signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>51</sup> Dalam surah Al-Baqarah 2: 198, berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu bertolak dari arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang tidak tahu.* (QS.Surah Al-Baqarah: 198)<sup>52</sup>

Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang di tetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan dengan (الباطل) al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang di istilahkan (عنتراضمنكم) 'an taradhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator tanda-tanda nya dapat terlihat. Ijab dan Qabul, atau apa saja yang dikenal dengan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2010), H.173-174

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.31

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (jakarta: Lentera Hati, 200), h. 499.

## b. Sunnah

Sunnah seringdisamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua stelah Al-Quran.<sup>54</sup> Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Di ataranya adalah hadis rifa'ah dan ibn Rafi' bahwa:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ لَكَسْبٍ أَطْيَبُ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
هُوَ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواهالبزاز والحاكم)

Artinyany : “Rasulullah SAW. Ditayanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang yang baik. Rasulullah SAW. Ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan “ (H.R. Al-Baz-zar dan Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat Allah SWT. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al- Baihaqi, Ibn Majah Hibban, Rasulullah SAW. Menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البهقي)

Artinya: “jual beli didasarkan suka sama suka.”<sup>56</sup>

Dalam riwayat at-Tarmizi:

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156

<sup>55</sup> Kutubus Sittah, juz III, Beirut: Daar Al-kutb Al-Ilmiyah, 1998 , h.4.

<sup>56</sup> Al-tarmizi, sunnah Al-tirmizi, juz 3, Maktabah Kutub Al-mutun (Al-mutun), h.5/5

عن أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّاجِرُ الصَّدُوقُ  
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu sa’id Radiyallahu Anhu, katanya: Rasulullah SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para Sidiqin, dan para Syuhad.” (H.R. Tarmizi).<sup>57</sup>

### c. Ijma

Ijma’ diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologi, ijma’ adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma’ umat Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara’.<sup>58</sup> Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan sunnah. Umat sepakat jual beli dan penukunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini).<sup>59</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما قام الدليل على منعه

Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>60</sup>

Itu artinya mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>61</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

<sup>57</sup> Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, juz III Beirut: daar Al-Fikri, t. Th. H. 515

<sup>58</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 165

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 48.

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 59-60

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantaranya para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>62</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang beri kuasa untuk menjual hartaorang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartannya (uangnya).<sup>63</sup>
2. *Shighat* (ijab dan qabul) yaitu persetujuan anatara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid, h. 75.

<sup>63</sup> Kumedi Ja'far, *Op. Cit*, h. 141.

<sup>64</sup> Ibid



3. Ada barang yang di beli untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab teradinya perjanjian jual beli.<sup>65</sup>
4. Ada nilai tukar pengganti barang nilai tukar pengganti barang sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan maka (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>66</sup>

#### **b. Syarat Jual Beli**

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

##### **1. Syarat yang berakad**

Ulama Fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Baligh dan berakal dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.<sup>67</sup> Baligh menurut hukum Islam (*fiqih*) dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidaksah namun demikian bagi anak-anak

---

<sup>65</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), H.249.

<sup>66</sup> Ibid, h.250.

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 118.

yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai.<sup>68</sup>

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Maksud bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak yang tidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli, yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>69</sup>

c) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.<sup>70</sup>

d) Keduanya tidak *mubazir* maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum menyangkut kepentingan semata.<sup>71</sup>

## 2. Syarat yang terikat dengan ijab dan qabul

---

<sup>68</sup> Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, 114

<sup>69</sup> Ibid, h. 142

<sup>70</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.120

<sup>71</sup> Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, H. 143

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa-menyewa.<sup>72</sup> Ulama fikih menyatakan bahwa syarat-syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berapa para (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah yang dikemukakan diatas.
  - b. Kabul sesuai dengan ijab contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga seratus dua puluh lima ribu rupiah“, lalu pembeli menjawab: saya beli dengan harga seratus dua puluh lima ribu rupiah.”
  - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan masalah yang sama.
  - d. Janglah diselingi dengan kata-kata lain anatra ijab dan qabul.
3. Syarat yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
- a. Barang itu ada, atau tidak di tempat ,tetapi pihak penjual menyatakan kesangupannya untuk mengadakan barang itu. Umapamanya barang itu ada pada suatu toko atau masih di pabrik dan yang lainnya masih disimpan di gudang sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual

---

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Loc.Cit*

berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia pandangan syara”.
- c. Milik seseorang barang yang sifatnya belum dimiliki, seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas di tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

#### 4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dari *as-Si'r*. menurut mereka, *as-tsamn* adalah pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati dua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit apabila barang itu



diayar kemudian (berhutang)maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syara.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam atau jual beli, terdapat beberapa kalsifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi syara setidaknya tiga bentuk, yaitu: 1). Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu telah diserahkan, serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli itu. Jual beli itu hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.
- 2). Jual beli yang batal, jual beli yang dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

Jenis-jenis jual beli yang batil antara lain:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli yang seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.
2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaran yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk kedalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik terdapat unsur penipuan.
4. Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan itu adalah najis dan tidak mengandung harta.
5. Jual beli *al-'arbut*, yaitu jual beli yang betuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uangnya yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah dalam penjual,.
6. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

- a. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:
- b. Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
7. Jual beli yang dikaitkan dengan sesuatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
8. Menjual barang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
9. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
10. Barter dengan barang yang diharamkan, umpannya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.
11. Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barang kepada orang lain yang pembayarannya di tunda selama satu bulan kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang yang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
12. Jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan membuat khamar.

13. Jual beli dengan syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “jika tuani harganya Rp.100.000, dan jika berhutang harganya Rp.125.000,.”
14. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan satuannya. Misalnya membeli tanduk kambing pada kambing yang masih hidup.
15. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

b. Ulama malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

1. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:

a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung.

b) Jual beli barang nya dianggapnya kelihatan seperti jual beli saham. Salam atau salaf itu sama artinya dengan pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan uang modal dimajelis akad.

2. Jual beli dilihat dari segi akad, yaitu:

a) Jual beli tanpa khiyar,

b) Jual beli khiyar.

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan hal ini, *Wahtahal Al-Juhalili*<sup>73</sup> membagi:

---

<sup>73</sup>Abi abdiklah Muhammad bin ismail, shahih bukhori, jilid III, h.12



1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah ahli akad (penjual dan pembeli, antara lain:

1). Jual beli orang gila maksudnya jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2). Jual beli anak kecil maksudnya yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali perkara-perkara yang ringan.

3). Jual beli orang buta jumhur ulama sepakat jual beli yang dilakukan oleh orang buta tanpa di terangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena tidak bisa membedakan barang yang jelek dn yang baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4). Jual beli *Fudhul* ialah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama yang demikiannya dipandang tidak sah, sebab dianggap orang lain (mencuri).

5). Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) maksudnya bahwa jual beli yag dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupu kebodohnya tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaain dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6). Jual beli Malja' ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

a. Jual beli gharar

Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian ini tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW. Bersabda: janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli itu termasuk gharar (menipu).<sup>74</sup>

Larangan *al-gharar* (menipu) secara bahasa mengacu pada makna; mengunragi, mengkhawatirkan, menjerumuskan diri, dalam kebinasaan dan kedodohan.<sup>75</sup> Adapun secara istilah, Gharar adalah ketidakpastian hasil atau ketidaktahuan akan hakikat atau kadar sesuatu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para imam. Dan sudah tidak bisa tidak, *gharar* harus ditiadakan dalam semua muamalah. Hadist berikut menjadi dalinya, “Diriwayatkan bahwa Nabi SAW, melarang jual beli yang

<sup>74</sup> Imam Ahmad bin Hanbal: Kitab Musnad Imam Ahmad

<sup>75</sup> Khalid bin Ali Al-Musyaqiqh, *sudah halalkah semua transaksi anda? fiqh mumalah masa kini*, (Klaten-Jawa Tengah, Inas Media: 2009), h. 26

mengandung gharar.” Hadist ini terdapat dalam shahih Muslim. Termasuk dalil yang dalam hal ini adalah larangan Nabi terhadap praktek jual beli anak dari anak onta, jual beli janin, jual beli mani dalam tulang rusuk pejalan dan lainnya, semua dalil ini menjadi dalil penguat atas kaidah ini.

Demikian pula larangan jual beli *mulamassah* (transaksi *mulamasah* adalah menjual dengan mengajukan syarat, pembeli tidak boleh menyentuh barang atau menyentuh berarti membeli- penjual). Dan *munabadzah* (sedang *munabadzah* adalah saling melempar barang tanpa ada tawar-menawar penjual). Juga jual beli barang yang tidak mungkin diserahkan. Semua larangan ini menjadi dalil dari ketentuan ini. Apabila ulama mensyaratkan beberapa hal yaitu bahwa suatu *gharar* dilarang dalam suatu akad jika:

1. Proporsi *gharar* terlalu banyak dalam suatu akad. Sebaliknya, jika kandungan *gharar* hanya sedikit maka tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu muamalah. Hal ini merupakan Ijma. Beberapa ulama ada yang mencontohkan penyewaan toilet untuk mandi. Dalam transaksi semacam ini terdapat unsur ketidakjelasan, yaitu waktu penggunaan dan kualitas air yang dipakai tidaklah sama antara satu orang dengan yang lain. Juga dengan model penyewaan mobil yang disewakan. Dalam dua contoh diatas terdapat unsur *gharar* tapi kadarnya hanya sedikit sehingga dimaafkan.

2. *Gharar* termasuk tidak terdapat dalam muamalah yang menjadi kebutuhan manusia. Al-Juwaini dan lainnya menyebutkan suatu kaidah dalam hal ini, “kebutuhan umum diposisikan sebagai sesuatu yang

mendesak. Syaikhul Islam Taimiyah berkata “pembuat syariat tidak mengharamkan transaksi yang dibutuhkan manusia hanya karena ada sedikit gharar, asalkan transaksi tersebut menjadi kebutuhan umum.” Dalilnya adalah hadist Ibnu Umar, bahwa Nabi melarang menjual buah-buahan sebelum tampak matang. Meskipun tidak semua pohon tersebut sudah matang keseluruhan, ada beberapa yang masih muda.<sup>76</sup>

3. Gharar yang masih memungkinkan dihindari tanpa menimbulkan kesulitan dan masalah. Para ulama memberikan contoh jual beli rumah beserta prabotannya, dan juga membeli seekor hewan bunting, hal-hal ini semacam ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali harus berusaha payah dulu.<sup>77</sup>

4. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli ini tidak ada kejelasan yang pasti.

5. Jual beli *Majhuly* yaitu jual beli barang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

6. Jual beli sperma binatang maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagai sabda Nabi:

---

<sup>76</sup> Ibid, h. 28

<sup>77</sup> Ibid, h.30



عَنْ أَبِي عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري) ٥

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang  
menjual sperma (mani) binatang.”<sup>79</sup>



---

<sup>78</sup> Shani Bukhari: Kitab At-Tijarah, Juz 3, h. 74, Bab 2

<sup>79</sup> Imam Bukhari: Kitab Shani Al-Bukhari

#### 7. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ جَابِرِ ر. ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ  
بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البجاري) <sup>80</sup>

Artinya “ Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.”<sup>81</sup>

#### **D. Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

Menurut peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Bahwa minyak bumi dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>80</sup> Shahih Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Yamamah, Beirut Cet. III, Th. 1407 H/1987 M.

<sup>81</sup> Imam Bukhari, *Op, Cit*, h.130

Usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Undang-Undang 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.<sup>82</sup> Di dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 menerangkan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Selain itu gas bumi adalah proses alami yang berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi ialah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi yang mengenai kondisi

---

<sup>82</sup>No Name, *Himpunan Peraturan Tentang Minyak, Gas Bumi, Pertambangan Batubara Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta, 2013), h.293

geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan Eksploitasi ialah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.<sup>83</sup>

Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan memepertinggi nilai tambah minyak bumi dan gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan ialah suatu kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan dan pengolahan, termasuk pengakutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan yakni, kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan gas bumi. Serta Niaga kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi atau hasil olahannya, termasuk gas bumi melalui pipa. Di samping itu ada pun badan usaha merupakan perusahaan berbentuk badan hukum menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam

---

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 295



wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Badan usaha pun adanya izin usaha yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Adapun itu, hak dan kewajiban pengusaan di pegang sepenuhnya oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pelaksana, Presiden serta Menteri ini lah yang menaungi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.<sup>84</sup>

Dalam Bab XI ketentuan pidana menerangkan bahwa Pasal 51 sampai dengan 57 bagi orang melakukan pelanggaran pidana:

Pasal 51 (1) setiap orang yang melakukan survei umum sbagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu tahun) atau denda paling tinggi Rp 10.000.000,00,- (2) setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtanagankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu tahun) atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,00,-.

Pasal 52 setiap orang yang melakukan eksplorasi atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam tahun) dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,00,-.

Pasal 53 setiap orang yang melakukan:

---

<sup>84</sup>Ibid, h.296-297

- a. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima tahun) dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00,-
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat tahun) dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000,00,-
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga tahun) dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00,-
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga tahun) dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00,-.<sup>85</sup>

Pasal 54, setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam tahun) dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,00,-

Pasal 55, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam tahun) dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,00,-

---

<sup>85</sup> Ibid, h.317.

Pasal 56, menerangkan ada dua yakni:

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau badan usaha tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap dan pengurusnya.
- 2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha atau badan usaha tetap, pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57 menerangkan ada bahwa:

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid, h.318

## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus**


##### **1. Profil Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus**

Pada tahun 1883 sejumlah penduduk dari Putih Doh dipimpin oleh Bapak Raden Saleh datang dan menetap di dusun Kuripan. Sejarah Kelurahan Kuripan secara lengkap tidak banyak dapat di ungkapkan karena tidak adanya catatan atau peninggalan masa lalu. Kelurahan Kuripan ditetapkan sebagai kelurahan pada tahun 1981 dan secara berantai dipimpin oleh. Bapak M. Tholib menjabat pertama kali menjadi sebagai kepala kampung Kuripan dari tahun 1945 sampai dengan masa jabat nya 1951. Selanjutnya dilanjutkan dengan Bapak Sulaiman menjabat sebagai kepala kampung Kuripan kedua menggantikan Bapak M. Tholib lama nya masa jabatannya dari tahun 1951 sampai dengan 1969 setahun menjabat Bapak Sulaiman turun dan digantikan dengan Bapak Sueb hanya beberapa bulan menjabat ia pun turun di tahun tersebut. Selain itu, pergantiannya kepala kampung Kuripan Bapak Mustafa yang dengan lama masa jabatannya ialah tahun 1969 sampai dengan 1974, lima tahun menjabat bapak Mustafa pun turun. Selanjutnya kepala kampung berikut dilanjutkan oleh Bapak Suwiji dari tahun 1974 sampai dengan 1980 karna ia masih di perhitungkan oleh masyarakat Kelurahan Kuripan ia pun menjabat lagi



pada Periode keduanya kurun waktu masa jabatannya beliau 1981 sampai dengan 1991.<sup>87</sup> Pada masa ia Kelurahan Kuripan yang tadi nya desa menjadi Kelurahan selain itu, pada saat berdirinya Kelurahan Kuripan yang dipimpin Bapak Lurah Suwiji terbagi nya lima lingkungan :

1. Kuripan Kota
2. Sabah Luppak
3. Bumi Agung
4. Kebun Kelapa
5. Way Tuba



Hingga akhir jabatannya, proses pergantian kelurahan kuripan pun dipimpin oleh seorang perempuan dengan Ibu Isnawati, BA menjabat sebagai lurah Kuripan dari tahun 1991 sampai dengan 1996. Pada masa Ibu Isnawati, BA menambah satu dusun lagi yang tadinya di masa bapak Suwiji hanya lima dusun dan dimasa Ibu Isnawati, BA. Menjadi enam dusun yang nama dusunnya madang jadi:

1. Kuripan Kota
2. Sabah Luppak
3. Bumi Agung
4. Kebun Kelapa
5. Way Tuba

---

<sup>87</sup> Hendarmawan Wahid (Lurah Kuripan), *Dokumentasi Kelurahan Kuripan dan Wawancara*, Juli 2018

## 6. Madang

Di periode selanjutnya, Bapak Drs.Zulkipli Bahri menjabat menggantikan dari ibu Isnawati, BA dengan masa jabatannya 1996 sampai dengan 2005. Pada periode bapak Drs. Zulkipli Bahri bertambahnya satu dusun lagi dengan dengan nama dusun tersebut Pancawarna inilah berkembang kelurahan kuripan:

1. Kuripan
2. Sabah Luppak
3. Bumi Agung
4. Kebun Kelapa
5. Way Tuba
6. Madang
7. Pancawarna



Hingga kini terus berlangsungnya pergantian kepala Kelurahan Kuripan oleh Bapak Akhyar Taufik lama jabatannya ia dari tahun 2005 sampai dengan 2008, dan berganti lagi kepala kelurahan kuripan berikutnya Bapak Sastra Winata, S.Kp menjabat sebagai lurah kuripan dari tahun tahun 2008 sampai dengan 2013, dilanjutkan kembali oleh Bapak Al Khozi, SE lama ia menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya kepala kelurahan kuripan dipimpin oleh Bapak Hendarman

Wahid, S.Kom menjabat sebagai lurah Kuripan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang.<sup>88</sup>

## 2. Kondisi Geografis, Penduduk, dan Pemerintahan Kelurahan Kuripan

### a. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Kuripan mempunyai luas wilayah 67,1 hektar, yang sebagian menjadi 61,85 hektar pemukiman, dan 1 hektar pertanian (sawah tadah hujan), kuburan 1 hektar, taman 0,5 hektar, perkantoran 1 hektar dan prasarana umum lainnya 0,5 hektar dan terdiri dari 7 dusun dan 23 RT, batasan-batasan sebagai berikut :

- 
- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelungu
  - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar Madang dan Baros
  - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Ratu
  - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kusa

Kelurahan Kuripan merupakan salah satu kelurahan wisata daerah Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tempat wisata yang masuk di wilayah Kelurahan Kuripan, seperti Pantai dan Gunung Tanggamus.

## 3. Keadaan Demografis

Kelurahan Kuripan secara administrative termasuk dalam Wilayah Kecamatan Kota Agung kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung dengan orbitasi sebagai berikut :

---

<sup>88</sup> Dokumentasi Lurah Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus

- a. Jarak kelurahan ke kantor kecamatan kurang lebih 3 km, dengan waktu jangkauan kira-kira 5 menit menggunakan kendaraan bermotor.
- b. Jarak kelurahan ke kantor Gubernur sekitar 35 km, dengan waktu jangkau kira-kira 3 jam saat lenggang dan 5 jam saat lalu lintas ramai.
- c. Jarak kelurahan ke kantor kabupaten kurang lebih 7 km, dengan waktu jangkau kira-kira 20 menit dengan kendaraan bermotor.

#### 4. Keadaan Sosial

Kelurahan Kuripan mempunyai jumlah penduduk 12.412 jiwa, tersebut dalam 23 Rt yang terdiri dari 6322 jiwa laki-laki dan 6090 jiwa perempuan. Berikut rincian data jumlah penduduk Kelurahan Kuripan.<sup>89</sup>

Penduduk Kelurahan Kuripan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.

No	Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	6322 Jiwa
2	Perempuan	6090 Jiwa
Jumlah		12.412 Jiwa

(Sumber: Monografi Kelurahan Kuripan Tahun 2018)

<sup>89</sup> *Pendataan Kependudukan Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2018*



Untuk kasus ini peneliti menyimpulkan dari penelitian yang berada di kelurahan Kuripan bahwa untuk pedagang eceran ada pedagang yang melakukan praktik jual beli bahan bakar premium campuran dapat di tinjau beberapa aspek-aspek kehidupan mulai dari tingkat pendidikan, agama, dan pekerjaan. Sebagaimana dengan tabel dibawah ini :

Pedagang eceran Kelurahan Kuripan di lihat dari segi aspek-aspek

Tabel. 2

Jenis kelamin	Agama	pendidikan	Pekerjaan	Jumlah
L	Islam	Tamat SMA/sederajat	Wiraswasta	10 orang
P	-	-	-	-

Pedagang eceran yang ada di kelurahan kuripan banyak dari mereka yang kehidupan berekonomian menengah kebawah, dari berbagai riwayat hidup pedagang banyak dari mereka beragamakan Islam akan tetapi bagi mereka yang muslim. Dari pedagang tersebut untuk tingkat pendidikan kebanyakan dari pedagang lulusnya SMA/Sederajat walaupun mereka tamatan dari sekolah menengah atas tidak menutup kemungkinan tentang pengetahuan mereka larangan bagi pelaku yang menjual premium diluar dari SPBU. Selain itu pekerjaan yang berada di kabupaten sangat banyak persaingan, banyak dari masyarakat ialah wiraswasta. Masyarakat di daerah tersebut melakukan berbagai kegiatan usaha

mereka. Mulai membangun usaha memanfaatkan yang berada disekitar. contoh jual hasil perkebunan, pertanian, perikanan dan juga usaha.

## **B. Praktik Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus**

Praktik yang ada di kelurahan Kuripan masyarakatnya secara garis besar perilaku mereka melakukannya perdagangan sangat baik, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-sehari mereka. Akan tetapi dalam hal penjualannya bahan bakar campuran yang mereka perdagangkan itu kurang lah sangat bagus untuk diperjualbelikan karena adanya unsur kecurangan mereka lakukan. Menurut beberapa orang yang saya wawancarai mereka mengatakan bahwa menjual bahan bakar premium untuk memenuhi kebutuhan salah satu menjual premium sangat menguntungkan dari mereka membeli dari SPBU dengan harga Rp. 6.450,- dan dijual kembali banyak ragam nya yang dari harganya Rp. 8.000,- , Rp. 8.500,- sampai pada harganya tinggi dengan harga Rp. 9.000,- selain itu biaya dalam melakukan pengecoran pada SPBU, sih pembeli tadi mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- untuk biaya jasa dalam 20 per/liter membayar kepada pihak SPBU tersebut.

Untuk hal ini masyarakat kelurahan mealakukan praktik jual beli premium campuran dengan oli tersebut didapatkan ditempat bengkel motor maupun mobil selain itu mereka juga mendapatkan dari kapal laut, akan tetapi oli itu di proses sebagaimana ia serupa bentuk cairan sama seperti dengan bensin pada umumnya. Ketika itu mereka melakukan dengan menyelesaikan pengelolaan oli dengan cara alami dan non alami. Seperti alami yang mula-mulanya oli

dimasukan dalam penampungan lalu pelaku ini melakukan pencampuran dengan metode penyulingan bahan ialah ijuk, pasir, jerami, dan dedek padi lalu mereka mencampur semua bahan menjadi satu. Dan diaduk dalam penampungannya hingga tercampur dalam bahan tersebut. Tetapi sebelumnya alat penampungan tadi sudah buat seperti penyaringan dengan lamanya proses sekitar dua hari sampai tiga hari proses penyulingan lalu sudah kelihatan semua oli bekas tadi warna hitam menghilang, selanjutnya oli bekas turun kebawah penampungan yang di buat baru dan dialirkan ke tempat yang sudah disediakan lalu oli pun berubah warna sama seperti layaknya premium pada umumnya. Lama menunggu kejernihan oli itu hanya memakan waktu sehari, kemudian melalui proses diatas oli bekas tadi yang sudah di proses dicampurkan dengan bensin (premium) yang murni di SPBU.

Selain itu dengan metode dari non alami atau disebut bahan kimia yaitu kaporit dan tawas metode ini juga sama cara dengan yang alami tetapi hanya mencampurkan oli dan bahan kimia saja dan menunggu sehari untuk penjernihan oli tersebut. Alat-alat yang digunakan dari masyarakat itu berupa drum-drum penampung yang besar dan juga tong besar, selain itu dibutuhkan 3 drum untuk melakukan penyulingan oli bekas tadi.

Penulis mendapat data dari masyarakat kelurahan Kuripan menurut keterangan salah satu warga kelurahan kuripan tersebut, masih melakukan praktik jual beli bahan bakar premium campuran. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 2014 berlangsungnya kegiatan mencampur bahan bakar premium campuran itu menggunakan oli bekas. Tetapi oli bekas tadi sebelumnya sudah diolah menjadi

serupa dengan premium yang ada di SPBU. Sebagaimana keterangan Bapak Bowo, hanya mencari keuntungan dengan cara cepat dan memang cara nya salah akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan saya lakukan. Yang lain pada jual Rp. 8.000,- saya jual dengan harga Rp. 9.000,- per/liter. Selain itu pun banyak pedagang lain juga sama melakukan praktek ini.<sup>90</sup>

Menurut bapak Aji, selaku yang dituakan selaku tokoh masyarakat juga pun sama mencari penghasilan dari bedagang jual beli bensin karna usaha di perkebunan sedang megalami pasang surut. Karna itu saya untuk memenuhi kebutuhan tersebut saya menjual yang lain dengan harga Rp. 8.000,- saya hanya menjual dengan harga Rp. 8.500,- , memang tidak banyak saya ambil keuntungan tersebut.<sup>91</sup> Menurut bapak Abi, beliau mengatakan saya menjual premium ini karna usaha saya dinelayan lagi belum bulan ikan itu keluar tetapi inilah sampingan saya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saya dan keluarga biasanya teman pedagang kios menjual dengan harga Rp. 8.000,- saya jual kembali dengan harga Rp. 9.000,- per/liter.<sup>92</sup>

Menurut bapak Rustam, saya sudah lama melakukan usaha ini tetapi saya belum ingin mencoba yang lain karna usaha ini sudah jelas keuntungan yang saya dapat, tapi memang saya sudah lama juga melakukan praktek ini. Karna kebanyakan kawan-kawan pedagang kios bensin pun hampir sama juga melakukan praktek ini. Saya pun menjual dengan harga Rp. 9.000,- kawan pedagang yang menjual nya dengan harga standar dari harga Rp. 8.000,-<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Bowo, Wawancara Penjual , 20 Juli 2018.

<sup>91</sup> Aji , Wawancara Penjual, 20 Juli 2018.

<sup>92</sup> Abi, Wanwawancara Penjual, 20 Juli 2018 .

<sup>93</sup> Rustam, Wawancara Penjual, 20 Juli 2018.



Menurut bapak Santani, saya menjual bensin ini sudah 2 tahun terakhir ini karna saya disarankan oleh kawan melihat keuntungannya sangat sedikit tetapi lancar ketika saya berjual namanya juga bedagang pasti ada untung dan rugi. Memang mencari usaha yang lain saya belum punya modal untuk membuka usaha lain. Biasanya saya jual bensin ini per/liter dengan harga Rp. 8.500,- pedagang lain menjual nya Rp.8.000,- .<sup>94</sup>

Menurut bapak Tamusi, saya melakukan praktek ini sudah 4 tahun terakhir ini dengan cara mengolah oli bekas tersebut agar serupa dengan bensin tersebut. Akan tetapi saya menjualnya kembali dengan harga standar dengan jual Rp. 8.000,- , karna disamping itu saya memenuhi kebutuhan pokok dari saya menjual bensin ini.<sup>95</sup> Menurut bapak Didit, saya melakukan praktek ini sudah setahun ini karena memang keuntungan yang saya dapat tidak besar, tetapi lancar dan uang pun dapat saya putar lagi membuka warung dan jual makan-makan ringan. Saya menjual bensin dengan harga standar dan juga kadang saya naikan harganya sesuai dengan kebutuhan pokok dari harga Rp.8.000,- sampai dengan harga Rp. 9.000 per/liternya.<sup>96</sup>

Menurut bapak Udin, saya menjual bensin ini sudah lama kurang lebih 2 tahun ini karna usaha disini agak payah kalau membuka usaha baru. Karena usaha walaupun keuntungan hanya sedikit tetapi kan lancar juga , untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah sedikit tercukupi. Kalau praktek ini campuran ini saya juga baru melakukan ini juga saya dapat dari teman saya dan caranya campuran saya diberitahu sistemnya penyulingan dan alat-alatnya pun

---

<sup>94</sup> Santani, Wawancara Penjual, 20 Juli 2018.

<sup>95</sup> Tamusi, Wawancara Penjual, 20 Juli 2018.

<sup>96</sup> Didit, Wawancara Penjual, 20 Juli 2018.

tidak terlalu banyak yang dibutuhkan. Saya juga menjual dikios dengan harga standar Rp. 8.000,-.<sup>97</sup>

Menurut bapak Ijal, saya sudah lama menjalankan usaha ini karna saya pun juga ingin punya pemasukan lain karna usaha saya adalah tani. Disini usaha bensin ini lancar walaupun keuntungan tidak banyak akan tetapi tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Saya pun melakukan praktek campuran ini juga baru dapat dari kawan pedagang kios lainnya. Tetapi saya tidak banyak merauk keuntungan hanya Rp.1.500,- dari saya jual bensin dengan harganya Rp. 9.000,-.<sup>98</sup>

Menurut bapak Hendri, saya berjualan bensin sudah cukup lama 5 tahun, tetapi saya disarankan oleh sesama pedagang kios coba campuran dengan oli bekas, tapi oli bekas tadi sudah diolah menjadi rupanya sama dengan bensin. Caranya dengan penyulingan yang dilakukan mencampurkan bahan-bahan alami seperti jerami, ijuk, pasir dan juga kaporit pewarna air. Sudah oli bekas tadi berubah warna sama layaknya dengan bensin, lalu saya baru campur dengan bensin murni. Saya pun menjualnya dengan harga Rp. 8.500,-.<sup>99</sup>

Karena dalam hal ini pemilik kios apabila ingin melakukan penjualan dikios di bebaskan biaya yang tadi dikeluarkan, selain itu praktik tadi standar keuntungan yang mereka dapat bagi yang menjual dikios, karena masyarakat kelurahan kuripan kebanyakan ia melakukan pembelian ke penjual premium yang berada dirumah/kios kenapa seperti itu, pasokan dari Provinsi sangat terbatas dari itu di bagi berbagai kabupaten yang di Lampung. Dan dari Provinsi memabagi nya dari berbagai kabupaten yang berada di Lampung. Jadi warga di yang berada di

---

<sup>97</sup> Udin, Wawancara Penjual, 20 Juli 2018.

<sup>98</sup> Ijal, wawancara Penjual, 20 Juli 2018.

<sup>99</sup> Hendri, wawancara Penjual, 20 Juli 2018.

berbagai daerah kurang pasokan bahan bakar yang utamanya premium (bensin) sangat lah terbatas.

Dari wawancara penjual saya juga mewancarai pembeli yang membeli bensin di kios tersebut karna mereka mengatakan bahwa ada yang bercerita kendaranyanya tadi mudah sekali panas. Selain itu tanki motor juga mengarat dan keropos karna efek dari campuran bensin dengan oli bekas tersebut. Menurut bapak Mohammad Amran (usia 48 th) mengatakan bahwa motor saya cepat sekali panasnya padahal jarak saya gunakan motor tersebut tidak jauh hanya kepasar, kebun, saya dan mengantar anak sekolah. Selain itu juga mudah sekali mati sendiri motor saya dalam perjalanan.<sup>100</sup> Menurut Bapak Iqbal (usia 25 th) mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau bensin itu dicampur. Akan tetapi, motor saya sering sekali mogok tidak terduga-duga.<sup>101</sup> Menurut Bapak Akbar (usia 28 th) mengatakan bahwa ia pun baru mendengar bahwa bensin dikios ternyata dicampur dengan oli bekas, tetapi motor saya alami mudah sekali cepat panas nya mesin, padahal saya juga tidak pernah jalan jarak jauh.<sup>102</sup> Menurut Irwanto siswa SMA (usia 17 th) saya malah tidak tahu kalau bensin tadi itu pun dicampur dengan oli bekas. Selama ini motor saya belum ada pengaruh apa-apa. Karena tadinya saya sering sekali membeli di SPBU.<sup>103</sup> Menurut Ibu Dewi (usia 39 th) saya jarang kalau tidak kepepet membeli dikois karna saya lebih seringnya di SPBU, karna memang lebih aman.<sup>104</sup> Menurut weni saya sering membeli bensin

---

<sup>100</sup> Mohammad Amran, Wawancara Pembeli, 20 Juli 2018 .

<sup>101</sup> Mohammad Iqbal, Wawancara Pembeli, 20 Juli 2018.

<sup>102</sup> Akbar, Wawancara Pembeli, 20 Juli 2018.

<sup>103</sup> Irwanto, Wawancara Pembeli, 20 Juli 2018

<sup>104</sup> Dewi, Wawancara Pembeli, 20 Juli 2018

dikios karna memang sangat cepat dan tidak mengantri, selain itu untuk bensin campuran saya tidak tahu kalau bensin itu dicampur.<sup>105</sup>

Menurut Ibu Asnai Saya baru mengetahui ternyata bensin yang selama ini saya beli campuran, tetapi memang saya tidak tahan untuk mengantri dimana SPBU ada bensin mangakanya saya pilih alternatifnya memilih dipedagang eceran.<sup>106</sup> Menurut Andri saya beranggapan sama saja membeli di SPBU maupun dipedagang eceran, tapi untuk campuran ini saya sangat kecewa dengan curang pedagang yang melakukan itu.<sup>107</sup> Menurut Desi saya saya tidak tahu kalau bensin itu sudah bercampur dengan campuran yang lain yang saya tahu sama saja dengan bensin pada umumnya. Tetapi saya juga belum merasakan efek dari bensin campuran tersebut.<sup>108</sup> Menurut Juhmani saya tiak mengetahui adanya bensin campuran karna saya pikir sama saja kok dengan bensin yang ada di SPBU dengan di pedagang eceran, tapi memang saya rasakan mesin kendaraan saya cepat sekali mengalami panas padahal tidak terlalu jarak saya berkendara.<sup>109</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli, ternyata jual beli bahan bakar premium campuran, tidak lah boleh karna melanggar peraturan perundang-undang dan hukum Islam. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang/kios. Karna memang dari kegiatan ini banyaknya merugikan orang banyak karna kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa premium tersebut tidak murni. Adapun juga yang tahu yang dilakukan oleh

---

<sup>105</sup> Weni, Wawancara pembeli, 20 Juli 2018

<sup>106</sup> Asnai, Wawancara Pembeli, 20 Juli 2018

<sup>107</sup> Andri, Wawancara Pembeli, 20 Juli 2018

<sup>108</sup> Desi, Wawancara Pembeli, 20 Juli 2018

<sup>109</sup> Juhmani, Wawan cara Pembeli, 20 Juli 2018

pedagang kios, bagi mereka yang tahu pasti tidak mau membeli di kios karna mereka lebih memilih di SPBU untuk pengisian kendaran mereka juga.





## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### **A. Praktik Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran pada Pedagang Eceran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kaupaten Tanggamus**

Ada beberapa pedagang eceran di kelurahan Kuripan pedagang melakukan praktik jual beli bahan bakar premium campuran dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan penjelelasan dalam Bab XI ketentuan pidana menerangkan bahwa Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 itulah gambaran bagi orang melakukan pidana:

Pasal 51 (1) setiap orang yang melakukan survei umum sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu tahun) atau denda paling tinggi Rp 10.000.000,00,- (2) setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu tahun) atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,00,-.

Pasal 52 setiap orang yang melakukan eksplorasi atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam tahun) dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,00,-.

Pasal 53 setiap orang yang melakukan:

- a) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima tahun) dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00,-
- b) Pengakutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengakutan dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat tahun) dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000,00,-
- c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga tahun) dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00,-
- d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga tahun) dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00,-.

Pasal 54, setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam tahun) dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,00,-

Pasal 55, setiap orang yang menyalahgunakan pengakutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam tahun) dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,00,-

Pasal 56, menerangkan ada dua yakni:

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau badan usaha tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap dan pengurusnya.
- 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha atau badan usaha tetap, pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah pentingnya.

Pedagang eceran banyaknya dari mereka tidak mengetahui tentang aturan-aturan yang disahkan oleh pemerintahan tentang minyak dan gas bumi. Karena dari sebagian pedagang ada yang tingkat pengetahuan kurang dalam hal peraturan perundang-undangan. Padahal sudah jelas dalam peraturan di tegaskan bahwa Pasal 53 mengatakan melarang bagi mereka yang menjual kembali minyak dan gas bumi perorangan dan juga tidak memiliki izin yang resmi dari lembaga pemerintahan untuk membukan badan usaha. Akan tetapi para pedagang tersebut untuk mencari jalan cepat untuk mendapatkan sebuah penghasilan agar bisa terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi sudah jelas, bahwa praktek ini tidak diperbolehkan diperjualbelikan lagi karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sudah melanggar dari mulai membeli dan dijual kembali apa lagi dijual dengan mencampur premium murni dengan oli bekas saja sudah melanggar, bagi pelaku yang

melakukan praktek ini. Sedangkan sanksinya kurungan penjara dan denda, jelas dalam beberapa pasal mengatakan dari mulai pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, serta niaga itu tidak boleh dilakukan.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus**

Jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli disebut juga dengan *Ba'i* yaitu transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini lazim disebut sebagai transaksi jual beli. Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Ada juga penjelasan dalam hukum Islam, jual beli yang dilarang dalam hukum Islam yakni *Gharar* suatu keabsahan serta haramnya suatu benda atau barang yang diperjualbelikan. Karena merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan yang ia lakukan. Bukanya hanya itu di dalam Islam pun memandang bahwa jual beli ini sama saja dengan perbuatan yang tercela dan tidak manfaatnya bagi manusia tersebut. Dalam objek penulis bahwa yang terjadi dimasyarakat Kelurahan Kuripan kegiatan ini sudah seharusnya dihentikan karena banyak merugikan orang banyak walaupun para pembeli tidak tahu atau tahu pun mereka pasti memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk kendaraan mereka.

Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian ini tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

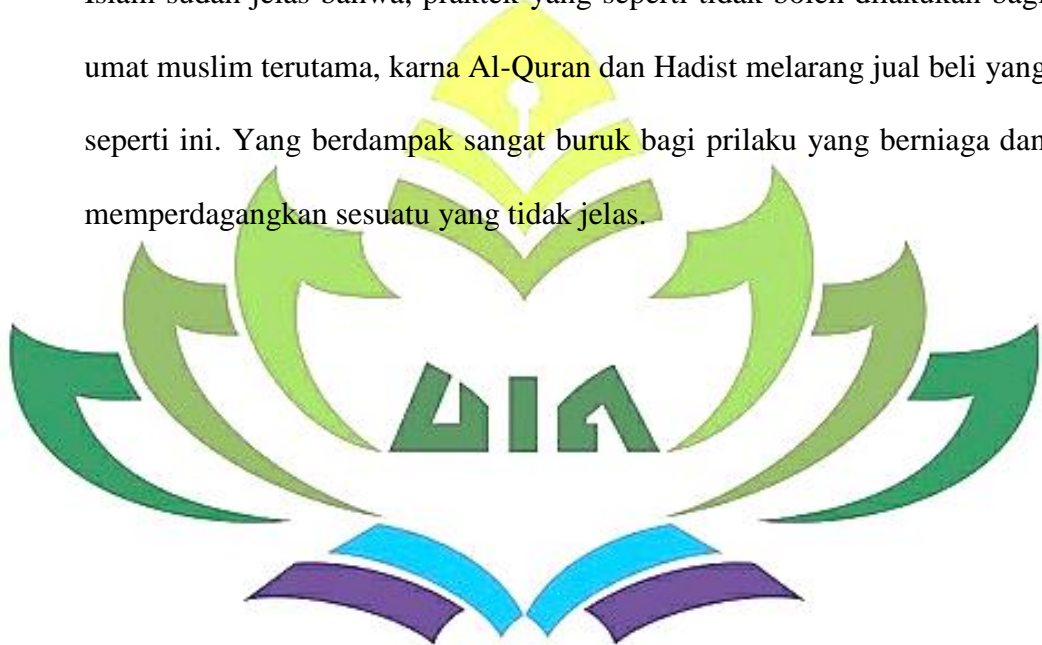
*Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW. Bersabda: janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli itu termasuk gharar (menipu).*

Larangan *al-gharar* (menipu) secara bahasa mengacu pada makna; mengurangi, mengkhawatirkan, menjerumuskan diri, dalam kebinasaan dan kebodohan. Adapun secara istilah, *Gharar* adalah ketidakpastian hasil atau ketidaktahuan akan hakikat atau kadar sesuatu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para imam. Dan sudah tidak bisa tidak, *gharar* harus ditiadakan dalam semua muamalah. Termasuk dalil yang dalam hal ini adalah larangan Nabi terhadap praktek jual beli anak dari anak onta, jual beli janin, jual beli mani dalam tulang rusuk pejalan dan lainnya, semua dalil ini menjadi dalil penguat atas kaidah ini.

Para pedagang eceran sebagian dari mereka beragama Islam harusnya dalam hal-hal jual beli mereka harus memperhatikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut syara. Tapi kebanyakan dari pedagang tersebut kurang pemahaman agama yang mereka dapatkan sehingga mereka melakukan praktek tersebut padahal jelas jual beli *gharar* itu



dilarang dalam syara. Bagi pedagang harus memahami jual beli menurut syara, tetapi sebagian dari mereka tidak peduli dengan *gharar* yang mereka lakukan bagi mereka yang membeli barangnya merasa sangat dirugikan oleh penjual. Pedagang yang melakukan praktik ini tidak melihat bagi untuk khalayak ramai merasa dirugikan atau tidak, bagi pelaku yang berbuat merasa tidak adanya rasa bersalah. Dalam hukum Islam sudah jelas bahwa, praktek yang seperti tidak boleh dilakukan bagi umat muslim terutama, karna Al-Quran dan Hadist melarang jual beli yang seperti ini. Yang berdampak sangat buruk bagi perilaku yang berniaga dan memperdagangkan sesuatu yang tidak jelas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli bahan bakar premium campuran pada pedagang eceran di kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sudah jelas bahwasanya peraturan ini melarang bagi badan usaha, badan usaha tetap, maupun perorangan yang tidak memiliki izin atas usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta juga penampung, pengakutan itu pun adanya sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56.
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Bahwa dalam hukum Islam jual beli ini dikategorikan pada *Gharar* yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli. Sehingga merugikan orang yang membeli karena pada hukum Islam melarang jual beli yang seperti ini, kurangnya baik ketika kita menjual barang yang tidak kejelasannya.

## B. Saran

Melalui karya ilmiah ini, penulis memberikan saran kepada tempat permasalahan yang telah terjadi ditengah masyarakat Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tentang jual beli bahan bakar premium campuran yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk tidak melakukan praktek jual beli bahan bakar premium campuran karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sudah tertera serta ada sanksi pidana dan melanggar ketentuan hukum Islam, khususnya fiqh muamalah.
2. Diharapkan bagi pemerintahan daerah agar melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana mestinya selaku yang menjalankan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus agar tidak terjadinya praktek yang seperti ini lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*, Al-Iqtishad, Vol. IV. Th. H. 515
- Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III Beirut: Daar Al-Fikri, t.
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah*, Bandung: PT Remaja Rosdak Karya, 1991.
- Ahmad bin Hanbal Kitab Musnadnya: Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud Nomor: No.1, 1 Januari 2012.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Bandung: Diponogoro, 2000.
- Al-tarmizi, sunnah Al-tirmizi, juz 3, Maktabah Kutub Al-mutun Al-mutun.  
Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ash-Shawi Shalah Dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Danim Sudarwan, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung C.V. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahan*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Dokumentasi Lurah Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus  
Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. dan Dra. Hj.Ru'fah Abdullah, M.M., *Fiqh muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam perspektif fiqh dan praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, University of Malaya , Kuala Lumpur, Malaysia, Vol.XII, No. 04, 4 Desember, 2015.

Hendarmawan Wahid Lurah Kuripan, *Dokumentasi Kelurahan Kuripan dan Wawancara*, Juli 2018.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Imam Ahmad bin Hanbal: Kitab Musnad Imam Ahmad Imam Bukhari: Kitab Shani Al-Bukhari

Ja'far A.Khumadi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Iain Raden Lampung, 2015.

Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda? Fiqh Mumalah Masa Kini*, Klaten-Jawa Tengah, Inas Media: 2009.

Kutubus Sittah, juz III, Beirut: Daar Al-kutb Al-Ilmiyah, 1998. Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fillughat*, Beirut: Darul Masyrik, 1973.

Khoiruddin, *Jual Beli Bermark-Up dan Pinjaman Bunga Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Adalah vol.9, Desember 2010.

M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2010).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Pendataan Kependudukan Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2018

PT. Tamita Utama. CV, *Himpunan Peraturan Tentang Minyak, Gas Bumi, Pertambangan Batubar Dan Peratutan Pelaksanaannya*, (Jakarta, 2013).

Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

Shahih Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Yamamah, Beirut Cet. III, Th. 1407 H/1987 M.



Shani Bukhari: *Kitab At-Tijarah*, Juz 3, h. 74, Bab 2 Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, *Jurna Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 no.2 (Desember 2015).

Solihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Total Media, (Yogyakarta, 2016).

Sudarmo, Indriyono Gito, *Pengantar Bisnis*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: BPEE, 2003).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Yunus Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997).

